

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Malang

###### a. Sejarah Malang<sup>41</sup>

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya, hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata

<sup>41</sup> [http://www.malangkota.go.id/mlg\\_halaman.php?id=1606071](http://www.malangkota.go.id/mlg_halaman.php?id=1606071), diakses tanggal 5 Juni 2013

guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah Peraturan Daerah Kota Malanggan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

- **Sekilas Sejarah Pemerintahan**

1. Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana.
2. Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota
3. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas
4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen

5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun.
6. 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja
7. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang
8. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia
9. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
10. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
11. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.]

- **Gelar yang Disandang Kota Malang:**

1. Paris of Java

Karena kondisi alamnya yang indah, iklimnya yang sejuk dan kotanya yang bersih, bagaikan kota Paris nya Jawa Timur.

2. Kota Pesiari

Kondisi alam yang elok menawan, bersih, sejuk, tenang dan fasilitas wisata yang memadai merupakan ciri-ciri sebuah kota tempat berlibur.

### 3. Kota Peristirahatan

Suasana Kota yang damai sangat sesuai untuk beristirahan, terutama bagi orang dari luar kota Malang, baik sebagai turis maupun dalam rangka mengunjungi keluarga/famili.

### 4. Kota Pendidikan

Situasi kota yang tenang, penduduknya ramah, harga makanan yang relatif murah dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat cocok untuk belajar/menempuh pendidikan.

### 5. Kota Militer

Terpilih sebagai kota Kesatrian. Di Kota Malang ini didirikan tempat pelatihan militer, asrama dan mess perwira disekitar lapangan Rampal., dan pada jaman Jepang dibangun lapangan terbang Sundeng di kawasan Perumnas sekarang.

### 6. Kota Sejarah

Sebagai kota yang menyimpan misteri embrio tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar, seperti Singosari, Kediri, Mojopahit, Demak dan Mataram. Di Kota Malang juga terukir awal kemerdekaan Republik bahkan Kota Malang tercatat masuk nominasi akan dijadikan Ibukota Negara Republik Indonesia.

## 7. Kota Bunga

Cita-cita yang merebak dihati setiap warga kota senantiasa menyemarakkan sudut kota dan tiap jengkal tanah warga dengan warna warni bunga.

### b. Penduduk dan Sosiologi

- **Jumlah**

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km<sup>2</sup>. Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar **820.243 jiwa** yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

- **Komposisi**

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina).

- **Agama**

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun-alun, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.

- **Seni Budaya**

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi).

- **Bahasa**

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda

berlaku dialek khas Malang yang disebut 'boso walikan' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya: seperti Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa Jawa kasar umumnya. Hal menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi

- **Pendatang**

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

## 2. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang

### a. Organisasi

Tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kebersihan dan keindahan Kota yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebersihan dan keindahan sesuai dengan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah, penyuluhan dan pemberian bimbingan sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah;
- b. Pengendalian dan Pengawasan teknis di bidang keersihan lingkungan;
- c. Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. Pelaksanaan koordinasi Instansi/Unit Kerja terkait;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan, anggaran/keuangan, ketatalaksanaan dan pembinaan organisasi Dinas.

Untuk mewadahi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusun struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum.

3. Bidang Pelayanan Kebersihan, terdiri dari:
  - a. Seksi Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan;
  - b. Seksi Pemungutan Retribusi;
  - c. Seksi Penyuluhan dan Pengaduan.
4. Bidang Pengelolaan Kebersihan, terdiri dari:
  - a. Seksi Kebersihan Jalan, Taman dan Makam;
  - b. Seksi Pengangkutan;
  - c. Seksi Pengelolaan TPS dan TPA.
5. Bidang Pertamanan, terdiri dari:
  - a. Seksi Taman;
  - b. Seksi Penghijauan Kota;
  - c. Seksi Penerangan Jalan dan Dekorasi Kota.
6. Bidang Pemakaman, terdiri dari:
  - a. Seksi Registrasi;
  - b. Seksi Penataan dan Perawatan;
  - c. Seksi Fasilitasi dan Peran Serta Masyarakat.
7. UPT, terdiri dari:
  - a. UPT Kebun Bibit Taman;
  - b. UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok:

1. Untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan
2. Untuk melaksanakan Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Sampah dan Air Limbah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan,
3. Untuk melaksanakan Peraturan Walikota Malang Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Pembibitan Tanaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
- b. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Kebersihan dan Pertamanan;

- c. Pelaksanaan pendataan dan pemungutan retribusi daerah di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan, jalan dan dekorasi kota, dan pemakaman;
- d. Pelaksanaan di bidang Kebersihan, Pertamanan, Penerangan Jalan, dekorasi kota dan pemakaman;
- e. Pengelolaan di bidang Kebersihan, Pertamanan, Penerangan Jalan, dekorasi kota dan pemakaman;
- f. Pengawasan di bidang Kebersihan, Pertamanan, Penerangan Jalan, dekorasi kota dan pemakaman;
- g. Penyuluhan di bidang Kebersihan, Pertamanan, Penerangan Jalan, dekorasi kota dan pemakaman;
- h. Pengelolaan Air limbah dan lumpur tinja;
- i. Pengadaan sarana dan prasarana
- j. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan Kebersihan, Pertamanan, Penerangan Jalan, dekorasi kota dan pemakaman;
- k. Pemberian pertimbangan teknis kerjasama di bidang Kebersihan, Pertamanan, Penerangan Jalan, dekorasi kota dan pemakaman;
- l. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang Kebersihan, Pertamanan, Penerangan Jalan, dekorasi kota dan pemakaman yang menjadi kewenangannya;

- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- p. Pelaksanaan Fasilitas pengukuran indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- q. Pengelolaan pngaduan masyarakat di bidang Kebersihan, Pertamanan, Penerangan Jalan, dekorasi kota dan pemakaman;
- r. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- s. Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan fungsi;

**c. Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan Kota Malang**

Jumlah Sarana dan Pra Sarana Bidang Kebersihan, sebagai berikut:

1. Angkutan

No	Jenis Sarana	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Truck	Unit	-	-
2.	Dump Troll	Unit	18	Baik
3.	Arm Roll	Unit	17	Baik
4.	Compactor	Unit	1	Baik
5.	Buldozer	Unit	4	Baik
6.	Excavator	Unit	2	Baik

2. Jumlah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)
  - a. 1 lokasi yaitu TPA Supit Urang
  - b. Teknologi dan Tahun Operasi TPA
    - 1) Tahun 1994-1998 (*Open Dumping*)
    - 2) Tahun 1998 (*Sanitary Landfill*)
  - c. Fasilitas Pemilahan Sampah
    - 1) Teknik : Manual
    - 2) Daur Ulang
  - d. Fasilitas composting
    - 1) Komposter: beroperasi
    - 2) Cetakan kompos, papan suhu, thermometer, garuk, sekop, bak tahu, ayakan kasar dan halus, landasan untuk penggelaran kompos.
3. Jumlah TPS (Tempat Penampungan Sementara)
  - a. Jumlah TPS 37 Lokasi
  - b. Fasilitas Pemilahan sampah:
    - 1) Teknik : Manual
    - 2) Daur ulang
  - c. Fasilitas Komposting
    - 1) Komposter: Beroperasi

- 2) Cetakan kompos, papan suhu, thermometer, garuk, sekop, bak tahu, ayakan kasar dan halus, landasan untuk penggelaran kompos.

d. Sarana Pengumpul

- 1) Gerobak: 150 unit (DKP)  
2 unit per RW
- 2) Sepeda Motor Gerobak: 25 Unit

4. Jumlah Tempat Pengolahan Sampah

a. Tempat Pengolahan Sampah di TPA

- 1) Komposting: 1 rumah kompos

b. Tempat Pengolahan Sampah di TPS

- 1) Jumlah TPS 73 Lokasi
- 2) Transfer Depo 15 Lokasi
- 3) Container 58 Unit
- 4) Komposting

- Ada 10 rumah kompos

- 1) Komposting Gadang
- 2) Komposting Tlogomas
- 3) Komposting Malabar
- 4) Komposting Manyar
- 5) Komposting Velodrom
- 6) Komposting Narotama

- 7) Komposting Jatimulyo
- 8) Komposting Arjosari
- 9) Komposting Pandanwangi
- 10) Komposting Cakalang

5. Sarana Pengumpul

- 1) Gerobak: 150 Unit (DKP)  
2 Unit Per RW
- 2) Tossa : 25 Unit

**3. Bank Sampah Malang**

**a. Berdirinya Bank Sampah**

Bank Sampah Malang (BSM) adalah lembaga yang berbadan hukum koperasi bekerjasama dengan Pemerintah Kota Malang dan CSR PT. PLN Distribusi Jawa Timur, didirikan sebagai wadah untuk membina, melatih, mendampingi sekaligus membeli dan memasarkan hasil dari kegiatan pengelolaan sampah dari hulu/sumber masyarakat Kota Malang dalam rangka pengurangan sampah di TPS/TPA dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sampah dengan program 3R (reduce, reuse dan recycle) serta perubahan perilaku masyarakat menuju lingkungan Kota Malang yang ber BSM, Bersih, Sejuk dan Manfaat.

Selain itu BSM juga membuka ilmu persampahan yang mempunyai nilai ekonomis sesuai pengalaman BSM dapat, sehingga bagi Pemerintah Daerah atau komunitas lingkungan maupun organisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat magang ke BSM atau BSM berbagi pengalaman dalam kegiatan Seminar, Semiloka, Workshop, Pelatihan, dls.

#### **b. Program dan Kegiatan Bank Sampah Malang**

Program dan Kegiatan BSM tahun 2012 yang sudah berjalan selain menabung sampah yaitu Pinjam Uang Nyicil Sampah, Beli Sembako Bayar Sampah, dan Bayar Listrik dengan Sampah hasil kerjasama dengan CSR PT. PLN Distribusi Jawa Timur, pembelian kerajinan daur ulang, pencacahan/flake plastik (terutama PET, PP, HDPE, LDPE, PS), di Tahun 2013 ini dikembangkan pada Pembelian Kompos dari nasabah BSM hasil kerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, Budidaya Cacing dengan pakan dari Sampah Organik, dan pengembangan pupuk cair dari air lindi sampah dan air seni manusia

#### **c. Dampak Adanya Bank Sampah Malang**

- 1) Aspek Lingkungan, sebagian kelompok sudah berubah perilakunya terkait dengan sampah, tidak membuang sampah an-organiknya ke tong sampah tetapi dipilah dan ditabung ke BSM, ada juga kelompok yang dekat sungai yang dulunya banyak sampah sekarang sudah

bersih dari sampah, dan saat ini sudah terbentuk image yang dulunya orang malu mengambil sampah di jalan dan memilah sampah, sekarang masyarakat yang terbentuk dalam kelompok binaan BSM merasa bangga dengan mengambil, mengumpulkan dan memilah sampah karena ada manfaatnya serta menghasilkan uang dengan ditabung di BSM. Selain itu keberhasilan kelompok dalam mengelola sampah telah menginspirasi masyarakat sekitarnya untuk bergabung dalam BSM atau membentuk kelompok binaan BSM.

- 2) Aspek Sosial, sebagian sudah terbentuk komunitas baru dimasyarakat yang tergabung dalam kelompok binaan BSM terutama pada saat penimbangan sampah anggota ke pengurus kelompok dan terbentuk juga rasa kepedulian lingkungan pada saat arisan, pertemuan PKK, dll dengan mengambil sampah dan memilah sampah dari kegiatan dimaksud.
- 3) Aspek Pendidikan, sebagian besar kelompok binaan BSM sudah mendapat pemahaman pendidikan lingkungan yang diteruskan ke anggotanya, yaitu betapa penting arti mengelola sampah, karena sampah kalo tidak dikelola akan mendatangkan petaka/masalah, tetapi kalo dikelola dengan baik dan benar mendatangkan manfaat dari aspek lingkungan maupun ekonomi. Sehingga diharapkan BSM ini sebagai embrio untuk pengelolaan sampah ramah lingkungan secara berkelanjutan.

- 4) Aspek Pemberdayaan, yaitu pemberdayaan di semua unsur ditingkat keluarga (bapak/ibu, anak-anak) sampai di tingkat lingkungan RT/RW dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Sehingga memberikan suatu kekuatan didalam melawan sampah yang tidak terkelola pada masyarakat yang tidak peduli tentang sampah.
- 5) Aspek Ekonomi Kerakyatan, yaitu pemberdayaan pada sistem menabung sampah dan menambah lapangan kerja baru dan pendapatan akibat dari pengelolaan sampah rumah tangga dan terdapat kemitraan mesin pencacah plastik yang dananya diarahkan mendapat dari bantuan dana hibah Kelurahan.

#### **B. Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

Sampah adalah problematika yang terjadi sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat kita, setiap hari kehidupan kita tidak bisa lepas dengan sampah. Persoalan sampah jika tidak segera diatasi akan menimbulkan persoalan lingkungan sosial yang berkepanjangan. Persoalan yang ditimbulkan dari timbunan sampah yang ada di suatu daerah sangatlah kompleks, timbunan sampah yang ada dapat menyebabkan pencemaran air, tanah dan udara yang ada di sekitarnya. Bayangkan saja ketika timbunan sampah tersebut tidak diolah maka akan menjadi gunung sampah yang

dapat merusak ekosistem. Dan penyelesaian persoalan sampah bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat.

Peran partisipasi masyarakat secara aktif sangat diperlukan dalam penyelesaian persoalan sampah. Dalam konteks Kota Malang untuk menuju Malang yang bermartabat maka diperlukan kerja sama dalam semua tingkatan untuk mengatasi persoalan sampah. Jumlah sampah yang ada di Kota Malang berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Sampah Per Hari di Kota Malang**

No.	Jenis Sampah	Satuan	Volume
1.	Sampah Organik	M <sup>3</sup> /hari	1.152
2.	Kertas	M <sup>3</sup> /hari	90
3.	Plastik	M <sup>3</sup> /hari	450
4.	Logam/Besi	M <sup>3</sup> /hari	18
5.	Kaca/Gelas	M <sup>3</sup> /hari	27
6.	Karet	M <sup>3</sup> /hari	18
7.	Kain	M <sup>3</sup> /hari	27

Sumber: Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Tahun 2012

Kita bisa melihat jumlah sampah pertahunnya apabila tidak dilakukan pengolahan tentu saja menjadi persoalan yang serius terutama bagaimana sampah-sampah tersebut mempengaruhi lingkungan. Nah dari data tersebut di atas maka kita bisa melihat seberapa jauh keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

Paradigma masyarakat selama ini terhadap sampah menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang<sup>42</sup> sebatas masih pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan tidak sampai pada pengelolaan. Masyarakat dirasa masih kurang peduli terhadap lingkungan dalam hal ini permasalahan sampah, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat masih sangat rendah.

Hal inilah yang kemudian membuat Dinas Kebersihan dan Pertamanan memikirkan strategi Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Model Pengelolaan sampah setelah adanya Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu dengan menerapkan strategi pengelolaan sampah sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Pengelolaan sampah tingkat hulu:

- 1) Mekanisme Pengelolaan dan Pemberdayaan Bank Sampah Malang
- 2) Lomba Lingkungan “Kampung Bersinar” antar RW se Kota Malang
- 3) Pengelolaan sampah dengan budidaya cacing, cacing dianggap sebagai hewan pengurai sampah organik
- 4) Pembentukan Kader Lingkungan.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, tanggal 6 Februari 2014

<sup>43</sup> *Ibid.*

b. Pengelolaan di Tingkat aturan

- 1) Dibangunnya Tempat Pengolahan Sampah 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dan kompos.
- 2) Dibangunnya Tempat Pengolahan Sampah 3R dan SPA (Stasiun Peralihan Antara)
- 3) Pemberdayaan Pemulung

c. Pengelolaan di tingkat hilir:

- 1) Penangkapan gas metan untuk kebutuhan masyarakat di sekitar TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Supit Urang.
- 2) Pengelolaan sampah dengan sistem lahan urug terkendali (control landfill)
- 3) Pemberdayaan Pemulung

Dengan adanya strategi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan disertai pengelolaan sampah dari tataran aturan terjadi peningkatan kesadaran dan berubahnya paradigma masyarakat, dengan ikut serta terlibat di dalam pengelolaan sampah di tingkat hulu, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadikan lingkungan tempat tinggalnya menjadi bersih dengan adanya lomba lingkungan “kampung bersinar”.<sup>44</sup>

Perubahan paradigma masyarakat ini juga dirasakan oleh Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang<sup>45</sup> menurutnya Paradigma masyarakat mengalami perubahan dan kesadaran mereka akan pentingnya memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomis sangat dirasakan ketika adanya bank sampah.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang, tanggal 21 Januari 2014

Namun menurut salah seorang warga masyarakat selama ini belum ada upaya dari Pemerintah Kota Malang untuk melibatkan masyarakat di dalam memberikan usulan, pertimbangan dan saran terhadap pengelolaan sampah di Kota Malang selama ini.<sup>46</sup>

Lain lagi dengan warga di Jalan Talun Pasar mengatakan bahwa ada pelibatan masyarakat dalam pemberian usulan pendapat dan pertimbangan, warga di daerahnya pernah mengusulkan tentang keberadaan pasukan kuning untuk mengatasi masalah sampah yang ada di wilayahnya pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan namun tidak ditanggapi sehingga warga di wilayahnya menjadi malas untuk memberikan pertimbangan dan saran.<sup>47</sup>

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah yakni pengelolaan sampah dari tingkat hulu, aturan sampai ditingkat hilir.<sup>48</sup>

Selama ini menurut masyarakat persoalan pengelolaan sampah yang ada di daerahnya menjadi tanggung jawab warga sendiri tanpa campur tangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan salah seorang warga Jalan arjuna, Kelurahan Kauman, Tanggal 22 Januari 2014

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan salah seorang warga Jalan Talun Pasar, Kelurahan Kauman Tanggal 23 Januari 2014

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, tanggal 6 Februari 2014

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan salah seorang warga Jalan Talun Pasar, Kelurahan Kauman Tanggal 23 Januari 2014

Peran Bank Sampah Kota Malang sendiri di dalam pengelolaan sampah dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif mendukung kegiatan bank sampah sebagai perwujudan dari strategi Pemerintah Kota Malang dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang.<sup>50</sup>

Masyarakat juga dilibatkan di dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang dalam implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Peran Masyarakat dalam memberikan usulan tentang pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) dari RT, RW sampai tingkat Kota Malang.
2. Melalui website Kota Malang atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3. Usulan bisa dilakukan secara langsung dengan cara masyarakat berkirim surat Kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan c.q Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

Peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan mekanisme:

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang, tanggal 21 Januari 2014

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, tanggal 6 Februari 2014

1. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) dari RT, RW sampai tingkat Kota Malang.
2. Melalui website Kota Malang atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Sementara itu peran serta masyarakat di dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Kota Malang adalah bisa secara langsung memberikan saran kepada Pengelola Bank Sampah Kota Malang, dan apabila ada hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan kebijakan maka Pengelola Bank Sampah Kota Malang langsung mengadakan musyawarah dengan para anggota masyarakat yang menjadi nasabah Bank Malang Kota Malang, termasuk pengembangan aktivitas-aktivitas Bank Sampah Kota Malang.<sup>52</sup>

Untuk menggugah kesadaran masyarakat Kota Malang berperan serta secara aktif di dalam Pengelolaan Sampah yang ada di Kota Malang dalam rangka implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, adalah dengan melakukan sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yaitu:

1. Mengadakan Lomba Kampung Bersinar
2. Lomba Kampung Zero Waste
3. Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif di dalam semua kegiatan Bank Sampah Malang dan menjadikan sampah bernilai ekonomis

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang, tanggal 21 Januari 2014

Fungsi dan Peran Bank Sampah Malang dirasakan telah merubah paradigma masyarakat dengan cara memilah sampah dari sumbernya. Di Bank Sampah Kota Malang sendiri model pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam rangka implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah adalah dengan mengadakan pelatihan pengelolaan sampah di masyarakat yang kemudian disusul dengan pembuatan kelompok-kelompok pengelolaan sampah dan terlibat secara aktif dalam semua kegiatan Bank Sampah Kota Malang. Kegiatan-kegiatan Bank Sampah Kota Malang merupakan aspirasi masyarakat Kota Malang yang menjadi anggota Bank Sampah Kota Malang.<sup>53</sup>

Tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan selama ini terhadap keberadaan Bank Sampah Malang menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang<sup>54</sup> adalah sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat untuk mengolah sampah melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi pada tim penggerak PKK Kota Malang sampai dengan RW;
2. Melakukan Sosialisasi pada ketua-ketua RW;
3. Melakukan sosialisasi dengan kader lingkungan;
4. Memberikan bantuan pada masyarakat berupa hibah sarana dan prasarana kebersihan RW diantaranya gerobak sampah, seragam pasukan kuning RW;

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang, tanggal 21 Januari 2014

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, tanggal 6 Februari 2014

##### 5. Sosialisasi bank sampah melalui media massa.

Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dirasakan lumayan namun sosialisasinya dirasakan kurang apalagi sarana dan prasarana yang ada dirasakan kurang juga.

Bank sampah di Kota Malang ada 1 buah, namun Bank Sampah Kota Malang memiliki unit-unit sebagai nasabahnya baik yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat, sekolah-sekolah, perkantoran, maupun individu-individu. Jumlah Nasabah kelompok masyarakat ada 306 unit, sementara nasabah kelompok sekolah 176 unit, perkantoran ada 27 unit dan perorangan ada 500 nasabah.<sup>55</sup>

Selama ini Bank Sampah Kota Malang dengan dibantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan selau melakukan sosialisasi tentang keberadaan Bank Sampah Kota Malang. Melalui kegiatan-kegiatan rutin warga di kampung masing-masing.<sup>56</sup>

Partisipasi masyarakat Kota Malang terhadap keberadaan Bank Sampah Kota Malang dirasakan sangat bagus, mereka dengan antusias mengajukan diri menjadi nasabah Bank Sampah Kota Malang.<sup>57</sup>

Pendanaan Bank Sampah Kota Malang selama ini berasal dari beberapa sumber pendanaan yaitu:<sup>58</sup>

##### 1. Bantuan modal dari Pemerintah Kota Malang;

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, tanggal 6 Februari 2014

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang, tanggal 21 Januari 2014

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, tanggal 6 Februari 2014

2. Bantuan Sarana dan Prasarana dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3. Bantuan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) PLN Kota Malang
4. Dana-dana yang terkumpul dari nasabah.

Ditambahkan pula oleh Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang<sup>59</sup> bahwa selama ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang selalu berupaya untuk memfasilitasi Bank Sampah Kota Malang dan membantu mensosialisasikan aktivitas Bank Sampah Kota Malang. Pembinaan pun juga dilakukan baik berkaitan dengan manajemen, operasional, serta pengembangan usaha.

Selama ini Dinas Kebersihan Kota Malang di dalam melakukan pengelolaan sampah tidak bekerja sendiri, Dinas Kebersihan dan Pertamanan bekerja sama dengan beberapa Dinas yang ada yaitu:

1. Dinas Pasar untuk pengelolaan sampah yang ada di pasar-pasar Kota Malang.
2. Dinas Perhubungan untuk pengelolaan sampah yang ada di terminal
3. Dinas Pendidikan untuk pengelolaan Sampah di sekolah-sekolah

Disamping itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang selalu menggandeng Bank Sampah Kota Malang di dalam melakukan pengelolaan sampah. Harapan Bank Sampah Kota Malang kedepannya ada pembiayaan unit-unit Bank Sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Dan Bank Sampah Kota Malang bisa dikenal dan bisa diselenggarakan secara serentak diseluruh wilayah Kota Malang.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang, tanggal 21 Januari 2014

### **C. Kendala-kendala Yang Dialami Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Di Dalam Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

Di dalam Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat tentu saja tidak semulus yang diharapkan ada kendala-kendala yang dirasakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang serta oleh Bank Sampah Kota Malang adalah sebagai berikut:

#### **1. Kendala Internal**

- a. Sarana Prasarana yang kurang memadai, seperti contoh kurangnya truk pengangkut sampah, seyogyanya tiap truk itu melakukan 2 kali muatan tetapi kenyataan di lapangan truk-truk yang ada mengangkut sampah 3-4 kali karena banyaknya volume sampah di kota Malang melebihi kapasitas yang telah diperkirakan. Contoh lainnya adalah TPA yang tidak mampu menampung sampah dikarenakan volume sampah yang ada melebihi daya tampung TPA.
- b. Minimnya Anggaran untuk pengelolaan sampah dalam APBD Kota Malang
- c. Minimnya Informasi yang disediakan tentang adanya pengelolaan sampah.

#### **2. Kendala Eksternal**

- a. Minimnya Kesadaran masyarakat di dalam ikut serta untuk melakukan pengelolaan sampah
- b. Retribusi sampah dari masyarakat yang kurang dari target yang ditetapkan diakibatkan oleh retribusi sampah yang murah.

**D. Upaya-Upaya Apakah Yang Dilakukan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Di Dalam Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada adalah sebagai berikut:

1. Kendala internal

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal dan melakukan pengolahan sampah dengan konsep reduce, reuse, dan recycling.
- b. Memaksimalkan Anggaran yang ada dan sudah dianggarkan di dalam APBD Kota Malang, untuk Bank Sampah Kota Malang upaya yang dilakukan adalah mengusahakan pembiayaan sendiri dengan membuat unit-unit usaha.
- c. Bank Sampah memfasilitasi secara mandiri keberadaan informai pengloalan sampah.

2. Kendala Eksternal

- a. Terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan jargon merubah sampah menjadi uang agar ke depannya masyarakat bisa memanfaatkan Bank Sampah Kota Malang dan juga mampu memilah dan mengelola sampah secara mandiri.
- b. Menyesuaikan Anggaran yang sudah ada di dalam APBD.